

Islamic Good Corporate Governance **(Tinjauan dalil dan teori)**

Arivatu Ni'mati Rahmatika, Universitas KH A.Wahab Hasbullah (UNWAHA)
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam.
Arivaturahmatika@gmail.com

Abstrak

Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah persaudaraan antar sesama, yang biasa disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah yang selanjutnya diartikan sebagai persaudaraan memiliki peran penting dalam hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerjanya, karena persaudaraan atau ukhuwah dianggap mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan profesionalitas antara perusahaan dan tenaga kerja.

Role and The Composition of Board terdiri pada Pemberian remunerasi (kompensasi), keterbukaan dan kejujuran sisi laporan keuangan dan hubungan baik antar sesama manusia baik yang terlibat didalamnya maupun yang tidak terlibat dalam usahanya, sama halnya juga dengan *good corporate governance* dalam islam juga terdapat aturannya.

Kata Kunci: Islam, GCG, aturan

Pendahuluan

Tenaga kerja memiliki potensi yang besar dalam berjalannya aktivitas perusahaan, potensi bagi tiap-tiap sumberdaya manusia harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengelola perusahaan agar tercapai apa yang diinginkan, sebuah perusahaan tidak bisa tergantung kepada mesin seratus persen, secanggih apapun teknologi, perusahaan tetap membutuhkan sumberdaya manusia. Hal tersebutlah maka dapat dikatakan bahwasannya sumber daya manusia yang dalam hal ini aalah tenaga kerja dijadikan sebagai aspek terpenting dalam berjalannya kegiatan perusahaan untuk mendapatkan output yang maksimal.

Merujuk pada hal tersebut, maka perusahaan membutuhkan loyalitas para tenaga kerjanya, perusahaan diharuskan dan diharapkan untuk menempuh beberapa

cara untuk meningkatkan kepedulian tenaga kerja terhadap perusahaannya. Cara tersebut dapat diaplikasikan dengan cara peningkatan kompetensi tenaga kerjanya, misalnya melalui pemberian kompensasi lebih terhadap tenaga kerjanya. Pemberian kompensasi lebih terhadap tenaga kerja merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap tenaga kerjanya selain itu, pemberian kompensasi tambahan juga dilakukan guna untuk menumbuhkan semangat kerja kepada tenaga kerja.

Lingkungan kerja yang baik dan kondusif juga dijadikan perusahaan sebagai cara untuk mendapatkan output yang dihasilkan, karena dengan hal yang demikian akan mampu meningkatkan kemampuan kinerja bagi para tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas kepada tenaga kerja untuk lebih menunjukkan kemampuan dan menghargainya, hal tersebut dapat ditempuh dengan cara pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja.

Setiap tenaga kerja mempunyai tujuan untuk bergabung pada perusahaan, yang mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan tidak sedikit tenaga kerja yang mengharap adanya tambahan materi maupun non materi dari keputusannya untuk bergabung dengan perusahaan. Karena hal tersebutlah maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya antara tenaga kerja dan perusahaan memiliki hubungan semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan diantara keduanya.

Tenaga kerja dan perusahaan sama-sama memiliki hak dan kewajibannya. Hak bagi perusahaan adalah mendapatkan loyalitas dari tenaga kerjanya, dan hak tenaga kerjanya adalah mendapatkan imbalan dari loyalitasnya. Untuk meningkatkan maupun menumbuhkan loyalitas tenaga kerja tersebut maka perusahaan dituntut untuk menempuh berbagaimacam cara yang contohnya sudah disebutkan sebelumnya, dan bagi tenaga kerja yang menginginkan pendapatan lebih dari

perusahaan maka juga diharuskan untuk memenuhi kewajibannya sebagai karyawan pada perusahaan tersebut.

Sejarah telah mencatat, bahwasannya persaudaraan antar sesama muslim mampu menakhlukkan kekuatan besar, sehingga mampu membentuk sekelompok masyarakat yang kokoh dan bersatu untuk membentuk sebuah peradaban. Dari situlah maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya persaudaraan merupakan manifestasi sebuah ketaan kepada Alloh yang telah melahirkan sifat sifat baik kepada manusia yaitu lemah lembut dan kasih sayang.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasannya islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk persaudaraan antar sesama, persaudaraan antar sesama bisa juga ditunjukkan melalui pemberian hadiah, pemberian hibah dan pemberian-pemberian lainnya yang hal tersebut bukti bahwasannya islam mengajarkan rasa kasih sayang antar sesama.

Islam mengajarkan umatnya untuk perduli terhadap sesama, keperdulian antar sesame dapat ditunjukkan walau dalam perusahaan yang notabene bertujuan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Islam juga mengajarkan prinsip kerjasama yang didalamnya ditekankan pola saling suka dan saling ridho. Maka dari itu, terdapat beberapa cara untuk tetap menjalankan tujuan dari perusaahn yaitu profit dan juga tetap menjalankan ajaran islam yang berupa kasih sayang.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10)

Remunerasi diartikan sebagai penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang atau bukan uang berdasarkan jabatan, kinerja, dan/atau tempat kedudukan dan ditujukan untuk: (1) memberikan penghargaan atas kinerja yang telah dicapai pegawai; (2) meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai; dan (3) mendapatkan dan mempertahankan pegawai terbaik.¹

Dalam tesisnya, Ilham Tahar yang berjudul kajian system remunerasi berbasis kinerja (studi kasus pada Bank Indonesia) menghasilkan kesimpulan bahwasannya remunerasi pada BI yang diberikan kepada karyawannya berbeda-beda sesuai dengan tempat kerjanya walaupun nilai kinerjanya menunjukkan hasil yang sama.

Hifdzul Muhammad S, dalam tulisannya yang berjudul pengaruh system remunerasi terhadap kinerja karyawan Sub direktoran SDM PT.Pos Indonesia (persero) remunerasi berpegaruh sebesar 22,7% dibandingkan dengan factor lainnya, dalam penelitian tersebut penyesuaian gaji dasar yang diberikan kepada karyawannya dianggap penting untuk dipertimbangkan.

Joseph E.O. Abugu dalam tulisannya yang berjudul *Monitoring directors' remuneration, fat cat packages and perks of office* menyimpulkan *existing rules monitoring directors' remunerations packages are ineffective. The rules do not address directors' pecks, expenses and other perquisites of office. Often these pecks are more valuable to the director than the actual remuneration package and they constitute a veritable avenue for dissipating company capital.*

Berdasar pada beberapa tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya remunerasi dianggap sebagai variable penunjang untuk membentuk loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Berikut adalah ayat yang menjelaskan bahwasannya perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya bukan pada tahtanya:

¹ Ilham Tahar, *Kajian sistem remunerasi berbasis kinerja (studi kasus pada Bank Indonesia)*, tesis UI, Jakarta, 2012, hal. 5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al- Hujuraat: 13)

Berangkat dari ayat tersebut, pada hakekatnya, dalam islam yang membedakan adalah ketaqwaannya. Sedangkan jabatan baik itu direktur ataupun bawahan itu adalah jenjang karir dunia yang juga didukung oleh islam, yaitu pada hadis:

دُنْيَاكُمْ

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, no. 2363)

Dari kedua dalil tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya islam mendukung adanya perkembangan keilmuan dan perkembangan karir namun tetap menghargai antar sesama. Selanjutnya dalam hal pemberian remunerasi, merupakan salah satu cara untuk menunjukkan adanya kepedulian dan penghargaan kepada karyawan/tenaga kerja. Yang dalam sikap manusiawinya tenaga kerja akan memberikan loyalitas tinggi kepada pihak perusahaan jika memang menerima penghargaan tersebut.

Dalil berikutnya adalah menjelaskan bahwasannya segala sesuatu harus diserahkan pada ahlinya, yaitu:

إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البخاري)

Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah)

Riwayat diatas, menunjukkan bahwasannya islam memberikan kebebasan kepada manusia atas segala urusan. Selanjutnya mengenai remunerasi, tergantung tiap perusahaannya, namun jika merujuk pada penelitian yang sudah disebutkan diatas, maka disimpulkan bahwasannya remunerasi bukan satu-satunya faktor untuk meningkatkan kinerja yang menumbuhkan loyalitas karyawan, terdapat faktor lain didalamnya. Untuk mengetahui apa saja dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja maka diserahkan pada ahlinya yang dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan selaku ahli dalam bidangnya.

Accounting atau Accountancy adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi dikenal sebagai "**bahasa bisnis**".²

Akuntansi sering disebut juga sebagai “Bahasanya dunia usaha” karena informasi ekonomi yang dihasilkan umumnya berbentuk angka-angka, sedangkan suatu usaha dalam suatu perusahaan outputnya berupa angka juga. Perusahaan yang menggunakan informasi secara efektif akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu lebih dahulu (lebih cepat), lebih benar (efektif) dan lebih murah (efisien) dibanding pesaingnya, karena informasi merupakan kebutuhan *user* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Huang et al (1999) menyatakan bahwa

² Apa itu Accounting ? Apa tugas dan tanggung jawab seorang Accounting?, <https://blog.lokerbandaaceh.com/2017/01/apa-itu-accounting-apa-tugas-dan.html>, diakses pada 30 Oktober 2017

“Informasi yang tidak berkualitas dapat mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil oleh *user* tidak berkualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian.³

Produk akhir akuntansi adalah laporan keuangan, dimana dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh pengguna adalah informasi yang dapat dipercaya. Sehubungan dengan diperlukannya informasi yang ada dilaporan keuangan rekanan bisnis dibutuhkan auditing. Akuntansi dan auditing memiliki hubungan yang erat selain itu auditing merupakan bagian dari akuntansi. Auditing merupakan bagian dari disiplin akuntansi. Keberadaan auditing menjebatani laporan keuangan yang disajikan klien dimana sering terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Artinya laporan keuangan yang disajikan organisasi (klien) masih memuat kepentingan satu pihak saja. Untuk menghindari laporan keuangan yang memihak tersebut harus di audit oleh auditor independen baru kemudian laporan keuangan bisa disampaikan ke penggunanya (*user*).⁴

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁵

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasannya diperlukan adanya keterbukaan keuangan kepada antar stakeholder perusahaan, selain keterbukaan diharuskan adanya kejujuran. Ayat berikut adalah ayat tentang diharuskannya keterbukaan dalam pelaporan keuangan:

³ Ely Suhayanti, *Kajian kualitas audit terhadap kualitas informasi dalam Laporan Keuangan*, Account Vol 1 No 2 Desember 2014, Hal. 118

⁴ Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si., Ak dan M.Rizal Hasibuan SE., M.Si, *Pemeriksaan Akuntansi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 2011, Hal.6-7

⁵ Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance 2006, Hal.5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqoroh 282)

The idea that the welfare of shareholders should be the goal of the corporation stems from shareholders status as residual claimants. Other stakeholders in the corporation, such as creditors and employees have relatively specific claims to the cash flows of the corporation. In contrast, shareholders are uncertain as to when or how much they will realize from their investment in the corporation, getting their return on investment from the residual only after all other stake holders have been paid. Theoretically, setting shareholders as residual claimants imparts the strongest incentive to maximize the company's value. Because corporations are an important societal institution for allocating capital, this also benefits society at large.⁶

The management literature demonstrates that running organisations based on stakeholder relationships is a feasible management alternative, especially for organisations with multiple and varied stakeholders, as is the case with political organisations. Stakeholder theory details how this approach may serve to make a significant contribution towards achieving organisational objectives. Nevertheless, this classification of stakeholder importance is not in itself enough. It is necessary to understand relationships so as to engage in actions able to meet stakeholder demands on the organisation. Managing the relationships with each stakeholder should furthermore pay attention to how these are guided by organisational actions and initiatives established with the purpose of creating, building and strengthening the organisation's bonds with each respective stakeholder.⁷

The stakeholder concept has become a dominant frame of reference for work in business, and organizations are increasingly using stakeholder language as well.

⁶ Alexander N dkk, Shareholders and stakeholders, http://virtusinterpress.org/additional_files/book_corp_govern/sample_chapter03.pdf diakses pada 30 Oktober 2017

⁷ Emerson Wagner Mainardes dkk, *A Model for stakeholder classification and stakeholder relationships*, Management Decision, Vol. 50 Issue 10, Hal. 1877

*Industrial relations scholarship and advocacy would benefit from familiarity and use of a concept – that of stakeholders – that is typical of how business academics and practitioners communicate.*⁸

*The relations between the subsidiary and the parent boards and how a governance improvement plan affected the internal dynamics of the organization and helped to clarify the demands of multiple stakeholders. A stakeholder-agency model is developed which emphasises the role of governance, the importance of structure and process, and the culture or ethos of boards in which multiple stakeholders may have compatible rather than competing interests.*⁹

Tulisan-tulisan diatas menjelaskan bahwasannya hubungan antar sesama manusia diharuskan pada hubungan yang baik, kebaikan disini mempunyai arti yang cukup luas, manusia sebagai sebaik-baik ciptaan dianjurkan untuk dapat berkontribusi positif kepada manusia lainnya. Berikut adalah ayat bahwasannya manusia adalah makhluk yang paling sempurna:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S At-tiin:4)

Seperti penjelasan diatas, selain dari itu, manusia juga diharuskan untuk berbuat baik kepada sesamanya, berikut adalah ayatnya:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ

وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

⁸ Harry J Van Buren III and Michalle Greenwood, *Bringing stakeholder theory to industrial Relations, Employee Relations*, Vol.33 Issue 1, Hal.7

⁹ Paul M Collier, *Stakeholder accountability: A Field of the implementation of a governance improvement plan*, *Accounting, auditing &Accountablity Journal* Vol 21 Issue:7, Hal. 933

Artinya: jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (Q.S Al-Isra': 7)

Paparan diatas menjelaskan bahwasannya, *Role and The Composition of Board* terdiri pada Pemberian remunerasi (kompensasi), keterbukaan dan kejujuran sisi laporan keuangan dan hubungan baik antar sesama manusia baik yang terlibat didalamnya maupun yang tidak terlibat dalam usahanya. Islam mengajarkan tata cara kehidupan manusianya di dunia sebagai bekal kebaikan di akhirat, maka selain hal ibadah islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Islam benar-benar memberikan kebebasan didalam hubungan antar sesama manusia (muamalah), tercatat dalam ushul fiqh yaitu:

الأصلُ في الأثنياء الإباحة

Artinya: asal dari segala sesuatu hukumnya adalah boleh

Penjelasan lanjutan dari hukum tersebut adalah selama tidak ada dalil untuk mengharamkannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemberian kompensasi yang dalam hal ini disebut dengan remunerasi diperbolehkan dan bisa dianggap sebagai hadiah. Dikarenakan pemberian remunerasi memiliki dasar pemberian, baik berupa prestasi maupun kinerja yang baik.

Kejujuran dan keterbukaan merukan suatu kewajiban bagi perusahaan kepada tenaga kerjanya, begitu pula sebaliknya. Karena keterbukaan dan kejujuran dianggap sebagai unsur pokok setiap hubungan manusia dalam hal perilaku berbisnis. Kejujuran dan keterbukaan dimaksudkan adalah dari sisi keuangan, sedangkan urusan lain yang berhubungan dengan cara pengembangan atau strategi pengembangan perusahaan dapat disembunyikan oleh pimpinan suatu perusahaan.

Manusia adalah makhluk yang sempurna dan manusia diharuskan untuk memberikan manfaat kepada manusia lain terutama disekitarnya, hal tersebut menjadi

dasar bahwasannya dalam segala usaha, manusia dituntut untuk memberikan kontribusi positif. Diantaranya jika secara islami dapat diaplikasikan dengan pemberian zakat, infaq dan shodaqoh.

Pembahasan

1. Agency Theory

Agency Theory is part of the positivist group of theories which derives from the financial economics literature. It postulates that the firm consists of a nexus of contracts between the owners of economic resources (the principals) and managers (the agents) who are charged with using and controlling those resources. Furthermore, agency theory is based on the premiss that agents have more information than principals and that this information asymmetry adversely affects the principals' ability to monitor effectively whether their interests are being properly served by agents. It also assumes that principals and agents act rationally and that they will use the contracting process to maximize their wealth. This means that because agents have self-seeking motives they are likely to take the opportunity to act against the interests of the owners of the firm, for example by partaking in high levels of perquisite consumption (that is, perks).¹⁰

Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada agen. Baik

¹⁰ Michael B. Adams, *Agency Theory and the Internal Audit*, Managerial Auditing Journal, Vol 9 Issue: 8, Hal. 8

prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan.¹¹

Dari dua kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya teori agensi mengakibatkan adanya hubungan yang dianggap tidak simetris antara pemilik dan pengelola suatu perusahaan, hal tersebut dikarenakan teori agensi digunakan dasaran untuk mengetahui tata kelola perusahaan dan manajemen keuntungan suatu perusahaan. Karena hal itulah maka diperlukan adanya konsep matang mengenai pengelolaan yang baik dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, yang selanjutnya disebut *Good Corporate Governance*.

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selamaini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Oleh karena itu, teori ini telah digunakan oleh berbagai peneliti di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, ilmu politik, perilaku organisasi dan sosiologi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.¹²

¹¹ Eko Raharjo, *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam prespektif Akuntansi*, ISSN: 1907-6304, Hal. 38

¹² Dwi westi sholihah, pengaruh financial stability, external pressure, personal financial need fan financial target dalam konsep fraud triange menurut SAS No.99 yang diproduksi dengan rasio keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, skripsi, universitas widyatama, bandung 2014. Hal. 11

Menurut Tiessen dan Waterhouse (1983) dalam melakukan identifikasi ada empat batasan yang dapat mengurangi hasil yang kurang bermanfaat dari model agensi.¹³

1. Model memfokuskan pada Yitigel period behavior (perilaku satu periode).
2. Validitas deskriptif manfaat yang memaksimalkan representasi perilaku dapat dipertanyakan.
3. Model dibatasi oleh tiga orang.
4. Beberapa penulis berargumen bahwa banyak perusahaan yang tidak dapat menerima analisis dari sudut pandang perjanjian formal.

Hal penting dalam Teori Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori Agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan. Sedangkan dalam teori stewardship, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri.¹⁴

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu:¹⁵

- a. Asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion)

¹³ Eko...., Hal.38

¹⁴ Ibid, Hal. 40

¹⁵ Wendy Endrianto, Analisa pengaruh penerapan Basel dan Good corporate governance terhadap manajemen risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2010, hal.10

- b. Asumsi tentang keorganisasian. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information (AI) antara prinsipal dan agen.
- c. Asumsi tentang informasi. asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Tiga asumsi tersebut diatas, dalam islam dapat dibatasi dengan etika dan Maqosid syariah. Etika merujuk pada sikap para stakeholdernya, dan maqosid syariah merujuk pada masing-masing pribadi individu, sehingga dengan kedua hal tersebut, menjadikan tiga asumsi diatas menjadi terkendali.

Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁶

Dalam rangka pembagian maqasid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).¹⁷

Asumsi teori agensi	Maqosid Syariah	Keterangan/Penjelasan
Asumsi tentang sifat manusia	<i>Hifdzud diin</i> <i>Hifdzul aql</i>	Asumsi ini menjelaskan bahwasannya manusia

¹⁶ Ghofar shidiq, Teori maqasid al-syari'ah dalam hukum islam, sultan agung vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009, Hal.119

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Us 1 al-Syar 'ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hal.10

		<p>mempunyai sifat utama yaitu mempertahankan diri dengan cara apapun, manusia dapat menempuh segala cara baik boleh maupun terlarang. Namun islam member batasan, manusia dalam gerak gerik kehidupan dunianya dibatasi pada agama, agama mengajarkan bahwasannya dianjurkan bagi manusia memberikan sebagian hartanya, karena pada hakikatnya harta yang ada sekarang bukanlah miliknya sepenuhnya, islam memfasilitasi dengan adanya zakat, infak dan sodaqoh. Selanjutnya manusia adalah makhluk yang sempurna dikarenakan anugerah akal, akal manusia diciptakan Alloh sedemikian rupa agar manusia menggunakan dan mengkreatifitaskan akalnya.</p>
--	--	--

<p>Asumsi tentang keorganisasian</p>	<p><i>Hifdzun Nasl</i></p>	<p>Keorganisasian dalam praktiknya merupakan hubungan antar manusia yang terstruktur, dalam praktiknya hubungan antar manusia tidak bisa terlepas dengan adanya konflik. Islam mengajarkan penanganan konflik dengan fikiran yang dingin sehingga tidak mengganggu adanya hubungan antar sesama manusia.</p>
<p>Asumsi tentang informasi</p>	<p><i>Hifdzul maal</i> <i>Hifdzun Nafs</i></p>	<p>Informasi dalam asumsi ini dianggap sebagai komoditas, karena dalam bisnis, tujuan utama adalah keuntungan. Dijadikan komoditas dimaksudkan adalah untuk mendapatkan keuntungan, diperluka informasi yang tepat. Informasi didapatkan dari orang yang dipercaya, dan informasi juga bermanfaat.</p>

Teori agensi merupakan aspek muamalah, yang hukum awalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya,

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan(1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (3), yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam(4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5). (Q.S Al-Alaq: 1-5)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia diajarkan dengan perantara qolam, maka manusia dapat melakukan segala sesuatu dalam hidupnya asalakan sesuai dengan ajaran Alloh.

2. Transaction Cost Theory

*Transaction cost economics (TCE) is among the most powerful theories used to explain the ways in which economic agents minimise transaction risks and related costs through the governance of vertical relationships.*¹⁸

*The transaction cost approach to the study of organizations has been applied at three levels of analysis:*¹⁹

2. *The overall structure of the enterprise. This takes the scope of enterprise as given and asks how the operating parts should be related one to*

¹⁸ Stefanella Staranleri, *Traceability and risk: an extended transaction cost prespective*, Supplay chain management: an International Journal, Vol.22 Issue: 2, Hal.145

¹⁹ Oliver E Williamson, *The economics of organization: the transaction cost approach*, American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3 (Nov 1981), Hal. 549

another. Unitary, holding company, and multidivisional forms come under scrutiny when these issues addressed

2. *The operating parts and asks which activities should be performed within the firm, which out side it, and why. This can be thought of as developing the criteria for and defining the “efficient boundaries” of an operating unit.*

3. *The manner in which human assets are organized. The object here is to match internal governance structures with the attributes*

Biaya transaksi adalah biaya untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (exchange). biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang lebih luas, yaitu:

1. biaya pencarian dan informasi;
2. biaya negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan
3. biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*).



Furubotn dan Ritcher menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction cost) dan biaya melakukan hal untuk memberi pesanan (order). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut dapat dibedakan menurut dua tipe:

1. **biaya transaksi ‘tetap’** (*‘fixed’ transaction costs*), yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (institutional arrangements); dan
2. **biaya transaksi ‘variabel’** (*‘variable’ transaction costs*), yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi.

Teori biaya transaksi atau transaction cost theory menurut penjelasan Oliver E. Williamson, yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara manusia dalam berbagai batasan. Williamson memandang berbeda terhadap dua pandangan pengembangan struktur yaitu pasar dan organisasi. Pada pasar, pertukaran terjadi lewat negosiasi kontrak dimana semua bagian diasumsikan bergerak untuk kepentingan pribadi. Dalam pandangan pengetahuan murni, pertukaran/transaksi merupakan kebutuhan semua bagian, dan harga didasarkan atas kepentingan individual serta tangan tak kelihatan (*invisible hand*) pada perekonomian bebas (sebagian besar adalah penjual dan pembeli) sehingga pengendalian biaya dibutuhkan oleh pasar bebas (*pure market*).²⁰ Dengan pemahaman tersebut di atas kemudian akan memberi penjelasan baru kepada kita tentang organisasi dalam perspektif biaya transaksi. Penjelasan pada pendekatan yang dibuat teori biaya transaksi memungkinkan kita membuka perspektif baru pula dengan lebih mendalam bagi penjelasan sejarah bisnis sebuah perusahaan (yang mungkin tidak dikenal) yang entah muncul dari mana, dan dalam waktu beberapa tahun telah mengambil kepemimpinan dengan mantap, kelihatannya tanpa usaha yang susah payah. Penjelasan yang selalu diberikan untuk hal ini adalah strategi yang unggul, teknologi yang unggul, atau struktur yang ramping. Tetapi ternyata ada fakta baru yang menjelaskan setiap kasus perusahaan pendatang baru yang selalu menikmati keunggulan biaya, biasanya 30 persen (Drucker, 1995). Alasannya berada pada penjelasan teori ini yaitu setiap perusahaan baru pasti mengetahui dan mengelola biaya dari keseluruhan rantai ekonomi pada pasar bebas bukan hanya biaya-biaya pada perusahaannya sendiri.²¹

²⁰ Teori biaya transaksi, <http://perilakuorganisasi.com/theori-biaya-transaksi-transaction-cost-theory.html>, diakses pada 03 Nopember 2017, 07.09

²¹ Ibid

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jum'ah: 10)

3. Stakeholder Theory

The concept of stakeholder participation has its roots in the business management and public administration literatures. Stakeholder participation was not prominent in the management literature until 1984 when Freeman wrote Strategic Management: A Stakeholder Approach. Freeman (1984) states that an organization can be characterized by its relationships with the organization's stakeholders. Freeman (1984) defined a stakeholder as "any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organizations objectives".²²

Donaldson and Preston (1995) developed three aspects to the stakeholder theory:²³ The descriptive/empirical, the instrumental, and the normative (Donaldson & Preston 1995).

3. 1The "descriptive/empirical" aspect of stakeholder theory is used to describe some characteristic and/or behavior of an organization or development (e.g. example size and type). This aspect is used to examine and explain the past, present and future state of affairs of an organization and its stakeholders (Donaldson & Preston 1995).
3. 2The "instrumental aspect" identifies the connections, or lack of connections, between stakeholder management and the achievement of the organization or

²² Erick T. Byrd, *Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development*, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2. Hal.7

²³ Ibid

development's objectives and goals (Donaldson & Preston 1995). The instrumental aspect establishes connections between specific actions and specific end results. For example if a hotel is built in a community then the hotel room inventory would increase in the community.

3. *3The “normative aspect” is the fundamental core of the stakeholder theory. The normative aspect “is used to interpret the function of the corporation, including the identification of moral or philosophical guidelines for the operation and management of corporations” (Donaldson & Preston 1995, p 71). From the perspective of the normative aspect, the reasoning behind an organization participating in an activity is because it is the right thing to do. Identification of a stakeholder, from this aspect, is based on the stakeholder’s interest in the organization, not the organization’s interest in the stakeholder.*

Seperti halnya pada pembahasan *Agency Theory*, Dalam rangka pembagian maqasid al-syari’ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).²⁴

Asumsi teori agensi	Maqosid Syariah	Keterangan/Penjelasan
<i>The descriptive/empirical</i>	<i>Hifdzud maal Hifdzul aql</i>	Aspek ini menjelaskan bahwasannya teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan kebiasaan anggota yang berkecimpung dalam suatu organisasi, yang selanjutnya dapat disebut dengan organisasi bisnis yang tujuannya adalah

²⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Us 1 al-Syar ’ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-’Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hal.10

		keuntungan. Selain kebiasaan, juga pembelajaran pada masa lalu yang digunakan untuk pengambilan kebijakan pada masa selanjutnya.
<i>The “instrumental aspect”</i>	<i>Hifdzun Nasl</i>	Setiap organisasi bisnis baik pada profit oriented maupun tidak, selalu dibutuhkan hubungan baik antar sesama anggota organisasi. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya kenyamanan kerja dan produktivitas yang meningkat.
<i>The “normative aspect”</i>	<i>Hifdzud diin Hifdzun Nafs</i>	Islam dengan sumber hukum pertamanya, telah mengatur segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Muslim dituntut untuk menaati segala aturan yang ada di dalamnya.

Freeman’s (1984) stakeholder theory has been applied to various areas such as corporate responsibility (Buchholz and Rosenthal, 2004), business ethics and project management (Turner and Simister, 2000). It has also been used in the context of organizational change (Trader-Leigh, 2002) and in combination with governance theories of economic organizations such as agency theory, transaction cost economics and property rights theory. We propose that stakeholder theory provides an interesting perspective in the management of organizational change projects, because organizational change is dependent on the resources possessed by various stakeholder groups and the support of key stakeholders. The focus of our research,

*therefore, is on a project's early phases when choosing the most appropriate topics amongst multiple change initiatives.*²⁵

*four different types of organizational change projects are identified based on these two dimensions:*²⁶

- 1. Low hanging fruits are changes that lead to assured results with only minor effort. These changes can be implemented as soon as the need for them becomes apparent and are common in situations where there has not been any concrete intention to develop the organization earlier.*
- 2. Continuous improvement means an ongoing series of minor interventions, which creates steady, but marginal, growth (Imai, 1986).*
- 3. Contrary to continuous improvement, strategic development projects require the managers' attention. The project's expected results are breakthrough improvements, such as cost structure or competitiveness.*
- 4. Lemons are projects when assessed in detail prove to be impossible or too labor intensive to implement for the expected results, and thus must be dismissed. Implementing them can diminish managers' credibility and legitimacy. An example of a lemon is an IT system that does not fulfill its reliability requirements and causes needless expenses and personnel orientation costs.*

*The concept of stakeholder participation has its roots in the business management and public administration literatures. Stakeholder participation was not prominent in the management literature until 1984 when Freeman wrote *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Freeman (1984) states that an organization can be characterized by its relationships with the organization's stakeholders. Freeman (1984) defined a stakeholder as "any*

²⁵ Antti Peltokorpi, *Stakeholder approach for evaluating organizational change projects*, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol 21 Issue: 5, Hal. 420

²⁶ Ibid

*group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organizations objectives”.*²⁷

*Donaldson and Preston (1995) developed three aspects to the stakeholder theory:*²⁸ *The descriptive/empirical, the instrumental, and the normative (Donaldson & Preston 1995).*

- 3. 4The “descriptive/empirical” aspect of stakeholder theory is used to describe some characteristic and/or behavior of an organization or development (e.g. example size and type). This aspect is used to examine and explain the past, present and future state of affairs of an organization and its stakeholders (Donaldson & Preston 1995).*
- 3. 5The “instrumental aspect” identifies the connections, or lack of connections, between stakeholder management and the achievement of the organization or development’s objectives and goals (Donaldson & Preston 1995). The instrumental aspect establishes connections between specific actions and specific end results. For example if a hotel is built in a community then the hotel room inventory would increase in the community.*
- 3. 6The “normative aspect” is the fundamental core of the stakeholder theory. The normative aspect “is used to interpret the function of the corporation, including the identification of moral or philosophical guidelines for the operation and management of corporations” (Donaldson & Preston 1995, p 71). From the perspective of the normative aspect, the reasoning behind an organization participating in an activity is because it is the right thing to do. Identification of a stakeholder, from this aspect, is based on the stakeholder’s interest in the organization, not the organization’s interest in the stakeholder.*

*Kasali dalam Wibisono (2007) membagi stakeholders menjadi sebagai berikut:*²⁹

²⁷ Erick T. Byrd, *Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development*, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2. Hal.7

²⁸ Ibid

1. Stakeholders Internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain.
2. Stakeholders primer, sekunder dan marjinal Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholders tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.
4. Proponents, opponents, dan uncommitted Diantara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak peduli atau abai (uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.
5. Silent majority dan vokal minority Dilihat

²⁹ Emy Iryani, *Komitmen Stakeholder perusahaan terhadap kinerja sosial dan kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek)*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, Hal.26-27

dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholders, yaitu:³⁰

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,
3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,
4. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu

³⁰ Ibid

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Q.S Al-Baqoroh: 83)

Wibisono (2007) dalam Yuniarti (2007) menyatakan secara garis besar kriteria kepuasan masing-masing stakeholders dapat digambarkan sebagai berikut:³¹

STAKEHOLDER	KRITERIA KEPUASAN
Pemegang Saham	Prestasi keuangan
Karyawan	Kepuasan kerja, gaji, supervise
Konsumen	Kualitas, layanan, lokasi, harga
Kreditor	Creditworthiness
Komunitas	Kontribusi terhadap komunitas
Pemasok	Transaksi yang memuaskan
Pemerintah	Kepatuhan terhadap hukum

Seperti halnya pada pembahasan *Agency Theory*, Dalam rangka pembagian maqasid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).³²

Asumsi teori agensi	Maqosid Syariah	Keterangan/Penjelasan
<i>The descriptive/empirical</i>	<i>Hifdzud maal</i> <i>Hifdzul aql</i>	Aspek ini menjelaskan bahwasannya teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan kebiasaan anggota yang berkecimpung dalam suatu organisasi, yang selanjutnya dapat disebut dengan organisasi bisnis

³¹ Ibid, hal.28

³² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Us 1 al-Syar 'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hal.10

		yang tujuannya adalah keuntungan. Selain kebiasaan, juga pembelajaran pada masa lalu yang digunakan untuk pengambilan kebijakan pada masa selanjutnya.
<i>The “instrumental aspect”</i>	<i>Hifdzun Nasl</i>	Setiap organisasi bisnis baik pada profit oriented maupun tidak, selalu dibutuhkan hubungan baik antar sesama anggota organisasi. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya kenyamanan kerja dan produktivitas yang meningkat.
<i>The “normative aspect”</i>	<i>Hifdzud diin Hifdzun Nafs</i>	Islam dengan sumber hukum pertamanya, telah mengatur segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Muslim dituntut untuk menaati segala aturan yang ada di dalamnya.

Daftar Rujukan

1. Al-Qur'an
2. Antti peltokorpi, *Stakeholder approach for evaluating organizational change projects*, International journal of health care quality assurance, Vol 21 Issue: 5
3. Erick T. Byrd, *Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development*, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2
4. Emy Iryani, *Komitmen Stakeholder perusahaan terhadap kinerja sosial dan kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek)*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009
5. Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Us l al-Syar 'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
6. Michael B. Adams, *Agency Theory and the Internal Audit*, Managerial Auditing Journal, Vol 9 Issue: 8
7. Eko Raharjo, *Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam prespektif Akuntansi*, ISSN: 1907-6304
8. Dwi westi sholihah, pengaruh financial stability, external pressure, personal financial need fan financial target dalam konsep fraud triange menurut SAS No.99 yang diproduksi

- dengan rasio keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, skripsi, universitas widyatama, bandung 2014
9. Wendy Endrianto, Analisa pengaruh penerapan basel dan Good corporate governance terhadap manajemen resiko pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2010
 10. Ghofar shidiq, Teori maqasid al-syari'ah dalam hukum islam, sultan agung vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009
 11. Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
 12. Stefanella Staranleri, *Traceability and risk: an extended transaction cost prespective*, Supply chain management: an International Journal, Vol.22 Issue: 2
 13. Oliver E Williamson, *The economics of organization: the transaction cost approach*, American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3 (Nov 1981)
 14. Teori biaya transaksi, <http://perilakuorganisasi.com/theori-biaya-transaksi-transaction-cost-theory.html>, diakses pada 03 Nopember 2017, 07.09
 15. Erick T. Byrd, *Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development*, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2
 16. Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
 17. Ilham Tahar, *Kajian sistem remunerasi berbasis kinerja (studi kasus pada Bank Indonesia)*, tesis UI, Jakarta
 18. Apa itu Accounting ? Apa tugas dan tanggung jawab seorang Accounting?, <https://blog.lokerbandaaceh.com/2017/01/apa-itu-accounting-apa-tugas-dan.html>,
 19. Ely Suhayanti, *Kajian kualitas audit terhadap kualitas informasi dalam Laporan Keuangan*, Account Vol 1 No 2 Desember 2014
 20. Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si., Ak dan M.Rizal Hasibuan SE., M.Si, *Pemeriksaan Akuntansi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 2011
 21. Alexander N dkk, Shareholders and stakeholders, http://virtusinterpress.org/additional_files/book_corp_govern/sample_chapter03.pdf
 22. Emerson Wagner Mainardes dkk, *A Model for stakeholder classification and stakeholder relationships*, Management Decision, Vol. 50 Issue 10
 23. Harry J Van Buren III and Michalle Greenwood, *Bringing stakeholder theory to industrial Relations*, Employee Relations, Vol.33 Issue 1
 24. Paul M Collier, *Stakeholder accountability: A Field of the implementation of a governance improvement plan*, Accounting, auditing & Accountability Journal Vol 21 Issue:7
 25. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance 2006